

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Keuangan

1. Pengertian Manajemen Keuangan

Fahmi (2018:2) berpendapat bahwa manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumberdaya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan mampu memberikan *profit* atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan *suistainability* (keberlanjutan) usaha bagi perusahaan.

Anwar (2019:5) manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan. Sedangkan menurut Brigham dan Houston (2001:6) manajemen keuangan merupakan bidang yang terluas dari tiga bidang keuangan, dan memiliki kesempatan karir yang sangat luas.

Jadi, berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah ilmu dan seni yang mempelajari tentang bagaimana seorang manajer keuangan mencari dana, mengalokasikan dana, dan membagi hasil keuntungan perusahaan bagi para pemegang saham dan untuk (*suistainability*) keberlanjutan usaha bagi perusahaan.

2. Tujuan Manajemen Keuangan

Harmono (2017:1) menyatakan bahwa tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham. Sedangkan menurut Anwar (2019:5) menyatakan bahwa tujuan manajemen keuangan adalah agar perusahaan dapat mengelola sumber daya yang dimiliki terutama dari aspek keuangan sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal dan pada akhirnya dapat memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham.

3. Fungsi Manajemen Keuangan

Fahmi (2018:3) menyatakan bahwa ilmu manajemen keuangan berfungsi sebagai pedoman bagi manajer perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan. Sedangkan menurut Harmono (2017:8) fungsi manajemen keuangan meliputi fungsi pendanaan, investasi, dan kebijakan deviden, dengan berbagai fungsi manajemen keuangan tersebut pada akhirnya mengarah pada menaikkan nilai perusahaan yang terflekksi pada harga saham, atau dapat dimaknai pemaksimalan kekayaan perusahaan bagi para pemegang saham.

B. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Salah satu pihak yang berkepentingan terhadap posisi dan kondisi keuangan adalah manajemen pengelola perusahaan, bagian ini sangat membutuhkan informasi keuangan yang dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. informasi tersebut umumnya disusun dan disajikan

perusahaan dalam bentuk neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas.

Munawir (2001:2) laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Sutrisno (2008) dalam Anwar (2011) berpendapat bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama yakni Neraca dan Laporan Laba Rugi. Sedangkan Brigham dan Houston (2001:8) mengatakan bahwa laporan keuangan adalah lembar kertas yang bertuliskan angka-angka, tetapi sangat penting juga untuk memikirkan aktiva riil di balik angka-angka tersebut.

Fahmi (2013) dalam Raya (2019) mengatakan bahwa laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Sedangkan Riyanto (2013:327) menyatakan bahwa laporan keuangan memberikan ikhtisar mengenai keadaan *finansial* suatu perusahaan, di mana Neraca mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu, dan laporan Rugi & Laba mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama suatu periode tertentu.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan akuntansi utama yang mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2. Jenis-jenis Laporan Keuangan

Fahmi (2018) mengatakan bahwa suatu laporan tahunan *corporate* terdiri dari empat laporan keuangan pokok yaitu:

- a. Neraca (*Balance Sheet*) menunjukkan posisi keuangan aktiva, utang, dan ekuitas pemegang saham suatu perusahaan pada tanggal tertentu, seperti pada akhir triwulan atau akhir tahun.
- b. Laporan Rugi/Laba (*Income Statement*) menyajikan hasil usaha pendapatan, beban, laba atau rugi bersih dan laba atau rugi per saham untuk periode akuntansi tertentu.
- c. Laporan Ekuitas Pemegang Saham (*Statement of Owner's Equity*) merekonsiliasi saldo awal dan akhir semua yang ada dalam seksi ekuitas pemegang saham pada neraca. Beberapa perusahaan menyajikan laporan saldo laba, sering kali dikombinasikan dengan laporan rugi-laba yang merekonsiliasi saldo awal dan akhir akun saldo laba. Perusahaan-perusahaan yang memilih format penyajian yang terakhir biasanya akan menyajikan laporan ekuitas pemegang saham sebagai pengungkapan dalam catatan kaki.
- d. Laporan arus kas (*Cash Flow Statement*) memberikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi selama suatu periode akuntansi.

Setiap komponen dalam laporan keuangan saling terkait. Karena proses laporan keuangan tersebut saling berkaitan maka ketelitian dan kehati-hatian (*Prudent*) sangat diperlukan, tanpa ada kehati-hatian yang mendalam hasil yang diperoleh tidak akan mencapai apa yang diharapkan.

3. Tujuan Laporan Keuangan

Hery (2014:5) tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan tujuan umum laporan keuangan adalah:

- a. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan dengan tujuan:
 - 1) Menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan,
 - 2) Menunjukkan posisi keuangan dan investasi perusahaan,
 - 3) Menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya, dan
 - 4) Kemampuan sumber daya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan.
- b. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba dengan tujuan:
 - 1) Memberikan gambaran tentang jumlah dividen yang diharapkan pemegang saham,
 - 2) Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban kepada kreditor, *supplier*, pegawai, pemerintah, dan kemampuannya dalam mengumpulkan dana untuk kepentingan ekspansi perusahaan,
 - 3) Memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengendalian, dan
 - 4) Menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba jangka panjang.
- c. Memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.

- d. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aset dan kewajiban.
- e. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan oleh para pemakai laporan.

Tujuan keseluruhan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Jenis keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan yang mereka gunakan dan kemampuan mereka untuk memproses informasi. Pengguna informasi akuntansi harus dapat memperoleh pemahaman mengenai kondisi keuangan dan hasil operasional perusahaan lewat laporan keuangan.

C. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan perusahaan perlu dilakukan analisis terhadap keuangan atau kinerja perusahaan. Wibowo (2016:3) menjelaskan bahwa kinerja merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun tersebut. Sedangkan menurut Mulyadi (2001) dalam Pasaribu (2019) penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas suatu organisasi, bagian organisasi dari karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jadi, yang dimaksudkan dengan kinerja adalah keseluruhan hasil yang dicapai atau diperlihatkan yang mencerminkan atau menggambarkan kondisi suatu organisasi atau badan usaha dalam kurun waktu tertentu.

2. Pengertian Kinerja Keuangan

Santoro (2013) dalam Saragih (2013) menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan hasil nyata yang dicapai suatu badan usaha dalam suatu periode tertentu yang dapat mencerminkan tingkat kesehatan keuangan badan usaha tertentu dan dipergunakan untuk menunjukkan dicapainya hasil yang positif.

Sucipto (2003) dalam Fraga (2014) kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007) dalam Prayoga, dan Afandy (2014) kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu *performance* yang mencerminkan kondisi keuangan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba yang dicapai perusahaan pada periode tertentu untuk menilai perubahan potensial sumber daya yang akan dikendalikan dimasa depan.

3. Pengukuran Kinerja Keuangan

Sawir (2005:6) menyatakan bahwa pengukuran kinerja keuangan dinyatakan untuk menilai kinerja keuangan dan prestasi perusahaan, analisis keuangan merupakan tolak ukur yaitu rasio atau indeks yang menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Hanafi (2005) dalam Fraga (2014) pengukuran kinerja keuangan adalah salah satu rasio untuk menilai prestasi perusahaan uang

menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban financial jangka pendek tepat pada waktunya.

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap *review* data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberikan solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Menurut Jumingan (2006) dalam Seragih (2013) berdasarkan teknikanya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 macam, yaitu:

- a. Analisis perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun dalam presentase (relatif).
- b. Analisis Tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
- c. Analisis Persentase per Komponen (*common Size*), merupakan teknik analisis untuk mengetahui presentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.
- d. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.

- e. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.
- f. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan diantara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.
- g. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
- h. Analisis Break Even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Gibson (2003) dalam Seragih (2013) menyatakan bahwa ada tiga perangkat variabel yang mempengaruhi perilaku dan prestasi kerja atau kinerja yaitu:

- a. Variabel Individual

Variabel individual terdiri dari kemampuan dan keterampilan, mental dan fisik, latar belakang (tingkat sosial), penggajian, dan demografis.

- b. Variabel Organisasional

Variabel organisasional terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur desain pekerjaan.

- c. Variabel Psikologis

Variabel psikologis terdiri dari persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi.

5. Jenis-Jenis Alat Ukur Kinerja Keuangan

Kasmir (2008) dalam Seragih (2013) mengatakan bahwa ada beberapa jenis alat ukur kinerja keuangan yaitu sebagai berikut :

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo.

b. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya seberapa besar beban utang yang akan ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya.

c. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporkan keuangan, terutama laporan laba rugi dan neraca.

d. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan.

6. Tujuan Kinerja Keuangan

Juminang (2006) dalam Fraga (2014) mengatakan bahwa terdapat 2 tujuan dalam kinerja keuangan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan, dilihat dari aspek kecukupan modal dan *profitabilitas* yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
- b. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua asset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

7. Manfaat Kinerja Keuangan

Mulyadi (2004) dalam Seragih (2013) mengatakan bahwa manfaat kinerja keuangan terdiri dari:

- a. Mengolah operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.
- b. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan.
- c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.

D. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang lebih tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dapat ikut campur tangan baik secara aktif maupun

secara pasif. Keterlibatan pemerintah dalam perekonomian, tidak lepas dari ideology yang dianut oleh negara tersebut.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lahir sebagai wujud implementasi dari kewajiban negara memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Membangun struktur perekonomian yang kuat, melalui bisnis yang sehat dan beretika merupakan salah satu jalan meraih kesejahteraan tersebut. Negara tidak mungkin secara langsung menjalankan aktifitas bisnis. Oleh karena itu, BUMN adalah pilihan tepat bagi negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Eksistensi BUMN di Indonesia dimulai dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang sekiranya dapat memperbaiki perekonomian Indonesia yang saat itu sedang mengalami keterpurukan.

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara adalah bentuk badan usaha negara yang modal seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh negara atau pemerintah dan dipisahkan dari kekayaan Negara.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 740/KMK 00/1989 yang dimaksudkan dengan Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara (Pasal 1 ayat 2a). atau badan usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki negara tetapi statusnya disamakan dengan BUMN yaitu (Pasal 1 ayat 2b): (1) BUMN

yang merupakan patungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah; (2) BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan BUMN lainnya; (3) BUMN yang merupakan badan-badan usaha patungan dengan swasta nasional atau asing di mana Negara memiliki saham mayoritas minimal 51%.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Negara adalah suatu unit usaha yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat.

2. Tujuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Menurut Hamid dan Anto dalam Akadun (2007), BUMN didesain untuk tujuan tertentu seperti menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan daerah, merintis sector yang belum dimasuki swasta, menyediakan fasilitas semi publik, ringkasnya tujuan BUMN adalah memaksimumkan kesejahteraan masyarakat dan memaksimumkan tujuan tertentu termasuk kemungkinan memperoleh keuntungan maksimal.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 pasal 2, maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak lain ialah: (a) untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (b) mengejar keuntungan; (c) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (d) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; (e) turut

aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan BUMN secara garis besar yaitu sebagai motor penggerak perekonomian nasional yang dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara serta mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di masa yang akan datang. Pada dasarnya tujuan umum pendirian BUMN adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

3. Penggolongan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN merupakan badan usaha yang secara hukum kepemilikannya dimiliki oleh Negara Indonesia dalam hal ini merupakan milik pemerintah. Setidaknya ada lima faktor yang mendasari terbentuknya BUMN, yaitu :

- a. Pelopor dan perintis karena swasta tidak tertarik untuk menggelutinya
- b. Pengelola bidang-bidang usaha yang strategis dan pelaksanaan pelayanan publik
- c. Penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar
- d. Sumber pendapatan Negara
- e. Hasil dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda

BUMN merupakan suatu asosiasi yang diadakan oleh pemerintah. Asosiasi merupakan suatu wadah kerja sama untuk jangka waktu yang relatif lama dan berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003, persero adalah BUMN yang memiliki tujuan utama untuk mengejar keuntungan dan modalnya terbagi atas saham yang paling sedikit 51% dimiliki oleh Negara dan

ditundukann kepada ketentuan-ketentuan tentang perseroan terbatas. Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa serta sekaligus mengejar keuntungan.

BUMN memiliki peraturan khusus yang berfungsi untuk mengawasi kondisi kesehatan perusahaan BUMN karena keistimewaan yang dimilikinya. Menurut Kementerian BUMN dalam fungsinya menjalankan peran pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002. Peraturan ini kemudian mengatur hal-hal yang terkait dengan perusahaan BUMN.

Perusahaan BUMN terdiri atas Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN), walaupun pada tahun 2005 Perjan sudah tidak diberlakukan lagi. Berdasarkan draf tersebut, pemerintah mengelompokan BUMN menjadi dua yaitu perusahaan non jasa keuangan dan perusahaan jasa keuangan berdasarkan fungsi yang dijalankannya. Perusahaan non jasa keuangan bertanggung jawab atas ketersediaan infrastruktur ataupun jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Di lain pihak perusahaan jasa keuangan bergerak pada bidang perbankan, asuransi, jasa pembiayaan, dan jasa penjaminan.

BUMN infrastruktur adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, yang bidang usahanya meliputi :

- a. Pembangkitan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik

- b. Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api
- c. Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut dan sungai atau danau, lapangan terbang dan bandara
- d. Bendungan dan irigasi

Sebagaimana dibahas pada pasal 5 ayat 1 Nomor : KEP-100/MBU/2002 diatas, BUMN infrastruktur bertanggung jawab dalam menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan BUMN non infrastruktur adalah BUMN yang tidak termasuk dalam BUMN infrastruktur.

BUMN inftrstruktur dan non infrastruktur terdiri atas lima sektor yaitu sektor industri dan perdagangan yang membawahi enam bidang; sektor kawasan industri jasa konstruksi dan konsultan konstruksi yang membawahi empat bidang; sektor perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata yang membawahi enam bidang; sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perdagangan yang membawahi empat bidang; dan sektor pelayanan umum.

4. Pengukuran Kinerja Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor: KEP-100/MBU/2002

- a. Imbalan kepada pemegang saham (*ROE*)

Keputusan Menteri BUMN RI Nomor: KEP-100/MBU/2002 menyatakan bahwa imbalan kepada pemegang saham (*ROE*) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ROE = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- 1) Laba setelah pajak adalah laba bersih dikurangi dengan laba hasil penjualan aktiva tetap.
- 2) Modal Sendiri adalah seluruh komponen modal sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen modal sendiri yang digunakan untuk membiayai aktiva tetap dalam pelaksanaan dan laba tahun berjalan.

Adapun skor penilaian *ROE* untuk BUMN non-infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Skor Penilaian *ROE* untuk BUMN Non-Infrastruktur

ROE (%)	Skor
	Non Infra
$15 < ROE$	20
$13 < ROE \leq 15$	18
$11 < ROE \leq 13$	16
$9 < ROE \leq 11$	14
$7,9 < ROE \leq 9$	12
$6,6 < ROE \leq 7,9$	10
$5,3 < ROE \leq 6,6$	8,5
$4 < ROE \leq 5,3$	7
$2,5 < ROE \leq 4$	5,5
$1 < ROE \leq 2,5$	4
$0 < ROE \leq 1$	2
$ROE < 0$	0

Sumber : Keputusan Menteri BUMN RI No. KEP-100/MBU/2002

b. Imbalan Investasi (*ROI*)

Keputusan Menteri BUMN RI Nomor: KEP-100/MBU/2002 menyatakan bahwa Imbalan Investasi (*ROI*) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ROI = \frac{EBIT + Penyusutan}{Capital Employed} \times 100 \%$$

Keterangan :

- 1) *Earning Before Interest Taxes (EBIT)* adalah jumlah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan akvita tetap.
- 2) *Capital Employed* adalah posisi akhir tahun buku total aktiva dikurangi aktiva tetap dalam pelaksanaan.

Adapun skor penilaian *ROI* untuk BUMN non-infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Skor Penilaian *ROI* untuk Non-Infrastruktur

ROI (%)	Skor
	Non Infra
18 < ROI	15
15 < ROI ≤ 18	13,5
13 < ROI ≤ 15	12
12 < ROI ≤ 13	10,5
10,5 < ROI ≤ 12	9
9 < ROI ≤ 10,5	7,5
7 < ROI ≤ 9	6
5 < ROI ≤ 7	5
3 < ROI ≤ 5	4
1 < ROI ≤ 3	3
0 < ROI ≤ 1	2
ROI < 0	1

Sumber : Keputusan Menteri BUMN RI No. KEP-100/MBU/2002

c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Keputusan Menteri BUMN RI Nomor: KEP-100/MBU/2002 menyatakan bahwa Rasio Kas (*Cash Ratio*) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Rasio\ Kas = \frac{Kas + Bank + Surat\ Berharga\ Jangka\ Pendek}{Current\ Liabilities} \times 100 \%$$

Keterangan :

- 1) Kas, bank dan surat berharga jangka pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun buku.
- 2) Hutang Lancar (*Current Liabilities*) adalah posisi seluruh kewajiban lancar pada akhir tahun buku.

Adapun skor penilaian *Cash Ratio* untuk BUMN non-infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Skor Penilaian *Cash Ratio* untuk BUMN Non-Infrastruktur

Cash Ratio = x (%)	Skor
	Non Infra
$x \geq 35$	5
$25 \leq x < 35$	4
$15 \leq x < 25$	3
$10 \leq x < 15$	2
$5 \leq x < 10$	1
$0 \leq x < 5$	0

Sumber : Keputusan Menteri BUMN RI No. KEP-100/MBU/2002

d. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Keputusan Menteri BUMN RI Nomor: KEP-100/MBU/2002 menyatakan bahwa Rasio Lancar (*Current Ratio*) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset lancar}}{\text{Hutang lancar}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- 1) Aset lancar (*Current Assets*) adalah posisi total aktiva lancar pada akhir tahun buku.

2) Hutang lancar (*Current Liabilities*) adalah posisi total kewajiban lancar pada akhir tahun buku.

Adapun skor penilaian *Current Ratio* untuk BUMN non-infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Skor Penilaian *Current Ratio* untuk BUMN Non-Infrastruktur

Current Ratio = x (%)	Skor
	Non Infra
$125 \leq x$	5
$110 \leq x < 125$	4
$100 \leq x < 110$	3
$95 \leq x < 100$	2
$90 \leq x < 95$	1
$x < 90$	0

Sumber : Keputusan Menteri BUMN RI No. KEP-100/MBU/2002

e. *Collection Periods (CP)*

Keputusan Menteri BUMN RI Nomor: KEP-100/MBU/2002 menyatakan bahwa *Collection Periods (CP)* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$CP = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365$$

Keterangan :

- 1) Total Piutang Usaha adalah jumlah piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang akan dihasilkan perusahaan yang harus ditagih dari pelanggan.
- 2) Total Pendapatan Usaha adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaan.

Adapun skor penilaian *Collection Periods* untuk BUMN non-infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Skor Penilaian *Collection Periods* untuk BUMN Non-Infrastruktur

CP = x (hari)	Perbaikan = x (hari)	Skor
		Non Infra
$x \leq 60$	$x \geq 35$	5
$60 < x \leq 90$	$30 < x \leq 35$	4,5
$90 < x \leq 120$	$25 < x \leq 30$	4
$120 < x \leq 150$	$20 < x \leq 25$	3,5
$150 < x \leq 180$	$15 < x \leq 20$	3
$180 < x \leq 210$	$10 < x \leq 15$	2,4
$210 < x \leq 240$	$6 < x \leq 10$	1,8
$240 < x \leq 270$	$3 < x \leq 6$	1,2
$270 < x \leq 300$	$1 < x \leq 3$	0,6
$300 < x$	$0 < x \leq 1$	0

Sumber : Keputusan Menteri BUMN RI No. KEP-100/MBU/2002

f. Perputaran Persediaan (PP)

Keputusan Menteri BUMN RI Nomor: KEP-100/MBU/2002 menyatakan bahwa Perputaran Persediaan (PP) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365$$

Keterangan :

- 1) Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang.
- 2) Total Pendapatan Usaha adalah total pendapatan usaha dalam tahun buku yang bersangkutan.

Adapun skor penilaian Perputaran Persediaan untuk BUMN non-infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6

Skor Penilaian Perputaran Persediaan untuk Badan Usaha Milik Negara Non-Infrastruktur

PP = x (hari)	Perbaikan = x (hari)	Skor
		Non Infra
$x \leq 60$	$35 < x$	5
$60 < x \leq 90$	$30 < x \leq 35$	4,5
$90 < x \leq 120$	$25 < x \leq 30$	4
$120 < x \leq 150$	$20 < x \leq 25$	3,5
$150 < x \leq 180$	$15 < x \leq 20$	3
$180 < x \leq 210$	$10 < x \leq 15$	2,4
$210 < x \leq 240$	$6 < x \leq 10$	1,8
$240 < x \leq 270$	$3 < x \leq 6$	1,2
$270 < x \leq 300$	$1 < x \leq 3$	0,6
$300 < x$	$0 < x \leq 1$	0

Sumber : Keputusan Menteri BUMN RI No. KEP-100/MBU/2002

g. *Total Asset Turn Over (TATO)*

Keputusan Menteri BUMN RI Nomor: KEP-100/MBU/2002 menyatakan bahwa *Total Asset Turn Over (TATO)* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$TATO = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- 1) Total Pendapatan adalah total pendapatan usaha dan non usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan aktiva tetap.
- 2) *Capital Employed* adalah posisi akhir tahun buku total aktiva dikurangi aktiva tetap dalam pelaksanaan.

Adapun skor penilaian *Total Asset Turn Over* untuk BUMN non-infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7

Skor Penilaian TATO untuk BUMN Non-Infrastruktur

TATO = x (%)	Perbaikan = x (%)	Skor
		Non Infra
$120 < x$	$20 < x$	5
$105 < x \leq 120$	$15 < x \leq 20$	4,5
$90 < x \leq 105$	$10 < x \leq 15$	4
$75 < x \leq 90$	$5 < x \leq 10$	3,5
$60 < x \leq 75$	$0 < x \leq 5$	3
$40 < x \leq 60$	$x < 0$	2,5
$20 < x \leq 40$	$x < 0$	2
$x \leq 20$	$x < 0$	1,5

Sumber : Keputusan Menteri BUMN RI No. KEP-100/MBU/2002

h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS terhadap TA)

Keputusan Menteri BUMN RI Nomor: KEP-100/MBU/2002 menyatakan bahwa Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS terhadap TA) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$TMS \text{ terhadap } TA = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- 1) Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen modal sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.
- 2) Total Asset adalah total asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

Adapun skor penilaian Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS terhadap TA) untuk BUMN non-infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8

Skor Penilaian Rasio TMS terhadap TA untuk BUMN Non-Infra

TMS thd TA (%) = x	Skor
	Non Infra
$x < 0$	0
$0 \leq x < 10$	4
$10 \leq x < 20$	6
$20 \leq x < 30$	7,25
$30 \leq x < 40$	10
$40 \leq x < 50$	9
$50 \leq x < 60$	8,5
$60 \leq x < 70$	8
$70 \leq x < 80$	7,5
$80 \leq x < 90$	7
$90 \leq x < 100$	6,5

Sumber : Keputusan Menteri BUMN RI No. KEP-100/MBU/2002

5. Mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan BUMN

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang penilaian tingkat kesehatan badan usaha milik Negara penilaian kinerja perusahaan BUMN pada aspek keuangan dilakukan dengan melihat beberapa rasio. Rasio tersebut merupakan indikator yang ditetapkan pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan BUMN. Perusahaan BUMN non jasa keuangan dibagi menjadi 2 yaitu BUMN infrastruktur (infra) dan BUMN non infrastruktur (non infra). Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor 100 Tahun 2002 menyatakan bahwa penilaian kinerja aspek keuangan BUMN dibagi menjadi delapan:

Tabel 2.9

Daftar Indikator dan Bobot Aspek Keuangan

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Imbalan kepada pemegang saham (<i>ROE</i>)	15	20
2. Imbalan Investasi (<i>ROI</i>)	10	15
3. Rasio Kas	3	5
4. Rasio Lancar	4	5
5. Collection Periods	4	5
6. Perputaran persediaan	4	5
7. Perputaran total aset	4	5
8. Rasio modal sendiri terhadap total aktiva	6	10
Total Bobot	50	70

Sumber : Keputusan Menteri BUMN RI No. KEP-100/MBU/2002

6. Penilaian Kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pada perusahaan swasta tidak ada peraturan baku yang mengatur tentang kesehatan kinerja perusahaan, sehingga masing-masing perusahaan dan industri menilai berdasar pengalaman-pengalaman masa lalunya, dan biasanya paling banyak digunakan adalah analisis likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas. Sama seperti halnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), semula dalam menilai kinerjanya juga dengan ketiga alat analisa diatas. Tetapi semenjak 1998 telah ada pedoman yang mengatur secara rinci penilaian tingkat kesehatan BUMN. Pedoman tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.

Berikut disajikan penggolongan tingkat kesehatan BUMN berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 :

Tabel 2.10

Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN untuk Seluruh Aspek

Tingkat Kesehatan	Kriteria Tingkat Kesehatan Secara Keseluruhan (Aspek Keuangan, Aspek Operasional dan Aspek Administrasi)
Sehat	
AAA	> 95
AA	$80 < TS \leq 95$
A	$65 < TS \leq 80$
Kurang Sehat	
BBB	$50 < TS \leq 65$
BB	$40 < TS \leq 50$
B	$30 < TS \leq 40$
Tidak Sehat	
CCC	$20 < TS \leq 30$
CC	$10 < TS \leq 20$
C	$TS \leq 10$

Sumber : Keputusan Menteri BUMN RI Nomor: KEP-100/MBU/2002

Tingkat kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan meliputi tiga aspek penilaian dengan bobot masing-masing sebagai berikut :

	Infra	Non Infra
a. Aspek Keuangan	50%	70%
b. Aspek Operasional	35%	15%
c. Aspek Administrasi	15%	15%

Dalam penelitian ini hanya mengukur berdasarkan aspek keuangan, maka aspek operasional dan aspek administrasi tidak diteliti dalam penentuan skor tingkat kesehatan BUMN.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian sebagai referensi, antara lain:

1. Asmara (2006), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Finansial Perusahaan BUMN Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, Studi Komparatif PT. Kimia Farma. Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kesehatan finansial perusahaan BUMN Non Infrastruktur pada PT. Kimia Farma ditinjau dari aspek keuangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dokumentasi dari Bursa Efek Jakarta (BEJ). Hasil dari penelitian ini adalah peneliti menyimpulkan bahwa tingkat kesehatan keuangan PT. Kimia Farma, Tbk lebih baik dibanding PT. Indo Farma, Tbk.
2. Haryono (2007) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan BUMN”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan Perum Jasa Tirta II tahun 2001-2004. Jenis penelitian adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, khusus pada aspek keuangannya saja. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 dapat disimpulkan bahwa: Perum Jasa tahun 2002 memperoleh total skor 45,75 dengan predikat AA, tahun 2003 memperoleh

total skor 26,5 menunjukkan kondisi kurang sehat dengan predikat BBB, sedangkan pada tahun 2004 memperoleh total skor 40,75 menunjukkan kondisi yang sehat dengan predikat AA.

3. Fraga (2014) dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Keuangan PT. Foda Prima Cargo dan Logistik Kupang”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT. Foda Prima Cargo dan Logistik Kupang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Metode analisis data menggunakan analisis rasio keuangan yaitu terdiri dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja keuangan pada PT. Foda Prima Cargo dan Logistik Kupang ditinjau dari rasio likuiditas tahun 2010-2012 yaitu sangat baik. *Current ratio*, *quick ratio* dan *cash ratio* pada tahun 2011 mengalami peningkatan karena rasio berada diatas 100%. Jika ditinjau dari rasio solvabilitas cenderung meningkat, hal ini terlihat dari *total debt to total assets ratio* dan *debt to equity ratio* pada tahun 2010 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 yang disebabkan karena meningkatnya jumlah hutang perusahaan baik itu yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang dan pada tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan karena menurunnya jumlah hutang perusahaan secara keseluruhan. Artinya perusahaan memenuhi jangka pendeknya sesuai dengan waktu yang ditetapkan dengan aset yang ada. Jika ditinjau dari rasio rentabilitas pada tahun 2009-2012 cenderung meningkat.

4. Prayoga, dan Afandy (2014), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan PT. Pegadaian (Persero) Berdasarkan KEPMEN BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002”. Tujuan penelitian adalah : 1) menganalisis rasio likuiditas pada PT. Pegadaian (Persero) berdasarkan KEPMEN BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002, 2) menganalisis rasio solvabilitas pada PT. Pegadaian (Persero) berdasarkan KEPMEN BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002, 3) menganalisis rasio aktivitas pada PT. Pegadaian (Persero) berdasarkan KEPMEN BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002, 4) menganalisis rasio profitabilitas PT. Pegadaian (Persero) berdasarkan KEPMEN BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja perusahaan bila diukur secara keseluruhan menunjukkan kinerja keuangan yang termasuk dalam kategori sehat. Kinerja keuangan rasio likuiditas bila diukur menggunakan rasio lancar menunjukkan hasil sangat sehat, bila diukur menggunakan rasio kas menunjukkan hasil tidak sehat. Kinerja keuangan rasio solvabilitas bila diukur menggunakan rasio modal sendiri terhadap total aktiva menunjukkan kinerja yang kurang sehat. Kinerja keuangan aktivitas bila diukur menggunakan rasio *total assets turnover* menunjukkan kinerja yang kurang sehat, bila diukur menggunakan rasio *collection periods* menunjukkan kinerja yang sehat. Kinerja keuangan profitabilitas bila diukur menggunakan rasio *Return On Equity* menunjukkan kinerja yang sangat sehat, bila diukur menggunakan rasio *Rerurn On Investment* menunjukkan kinerja yang sangat sehat.

F. Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* (1992) dalam Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori terhubung dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.

Penilaian perkembangan kinerja keuangan PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Sub Cabang Kupang dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha perusahaan tersebut yang tercermin dari laporan keuangannya dari tahun ke-tahun. Kinerja keuangan itu sendiri dapat diartikan sebagai prestasi perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangannya didalam usahanya.

Gambaran mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diperoleh dengan cara melakukan interpretasi atau analisis terhadap laporan keuangannya, sehingga laporan keuangan tersebut bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

Penilaian perkembangan kinerja keuangan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) Sub Cabang Kupang dapat dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu. Perkembangan kinerja keuangannya dianalisis melalui analisis laporan keuangan, yaitu analisis rasio (likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas) yang berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-100/MBU/2002 berdasarkan aspek keuangan, serta proyeksi kebutuhan dana untuk periode berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan tersebut dapat diketahui perkembangan kinerja keuangan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) Sub

Cabang Kupang untuk empat periode terakhir (2009-2012) dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.

Adapun kerangka pemikirannya dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini :

Gambar 2.1

Kerangka Dasar Pemikiran

